



# Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>



## Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018 – 2023

<sup>1</sup>Ghina Meilany Aghnia, <sup>2</sup>Arvian Triantoro, <sup>3</sup>Raden Dian Hardiana

<sup>123</sup>Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,  
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesiaia  
Correspondence: E-mail: [ghinaaghnia3903@upi.edu](mailto:ghinaaghnia3903@upi.edu)

### ABSTRACT

Research on the effect of financial performance on poverty levels through economic growth as an intervening variable provides varying results. This study analyzes the effect of regional financial performance on poverty levels in districts / cities in West Java through economic growth as an intervening variable with a sample of 27 districts and cities in West Java for 6 years, in the period 2018-2023. The data obtained is secondary data in the form of expenditure and revenue realization targets, economic growth rates (GRDP), and poverty rates. The data analysis technique uses multiple regression analysis with path analysis. The results of this study indicate that the independence ratio and the revenue effectiveness ratio have no effect on economic growth, while the Efficiency Ratio affects economic growth on economic growth. Economic growth has no effect on poverty levels. While directly, the Independence Ratio affects the poverty rate, but the effectiveness ratio and efficiency ratio have no effect on the poverty rate in districts / cities in West Java. Then the sobel test produces research on the Independence Ratio, the effectiveness ratio and the Efficiency Ratio have no effect on the poverty rate with economic growth as intervening.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted/Received 10 April 2025

First Revised 11 May 2025

Accepted 10 July 2025

First Available online 31 August 2025

Publication Date 31 August 2025

#### Keyword:

Regional Financial Performance, Poverty Level, Economic Growth, Intervening Variable

## 1. INTRODUCTION

Otonomi daerah dapat disimpulkan sebagai hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan juga untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan dan hasil pembangunan daerah sesuai dengan amanat undang-undang (Fery, 2021).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan definisi tentang otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian undang-undang tersebut telah memberikan kesempatan yang luas bagi daerahnya sesuai kewenangan yang dimilikinya dengan cara mengoptimalkan potensi dan sumber daya guna dapat mewujudkan kemandirian daerah dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri (Fery, 2021).

Kemiskinan merupakan suatu isu yang tidak pernah lepas dari suatu wilayah. Berbagai macam kebijakan dikerahkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dikarenakan yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), kemiskinan muncul dikarenakan ketidakmampuan ekonomi dimana masyarakat tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya (*basic needs approach*). Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut akan menyebabkan turunnya kualitas sumber daya manusia. Turunnya kualitas sumber daya manusia diikuti oleh turunnya produktivitas yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan nasional suatu wilayah (Astuti & Lestari, 2018).

Melalui konsep pembangunan desentralisasi, upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di setiap daerah diharapkan dapat memberi keuntungan dan kesejahteraan pada masyarakat sehingga dapat menjadi harapan besar bagi masyarakat agar bebas dari jerat kemiskinan (Kura et al, 2015). Menurut Zamhari (2017), dalam tataran konsep, semua pemerintah provinsi, daerah dan kota berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakatnya, hal tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi misi kesejahteraan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang jauh dari kategori Sejahtera.

Dimulainya era reformasi menjadi awal baru bagi pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang mengukur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi pemerintahan daerah (eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) (Kementrian Keuangan RI). Dalam teori *federalism fiscal* dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan desentralisasi fiskal melalui pelaksanaan

otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan Keputusan kepada pemerintah tingkat daerah yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik jangka panjang (Faridi, 2011). Otonom daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengelola pemerintahannya daerah memerlukan penilaian untuk melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah (Astuti, 2015).

Pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan daerah untuk dapat mengetahui capaian keuangan suatu daerah. Oleh karena itu pengukuran kinerja daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien, transparansi, akuntabilitas dan adanya partisipasi masyarakat guna mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan berdampak pada pengurangan jumlah kemiskinan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran sebagai instrument kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek domini yang positif yaitu menurunkan tingkat kemiskinan (Astuti, 2015).

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan membuat analisis rasio-rasio keuangan yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran tertentu. Rasio-rasio keuangan ini selanjutnya dibandingkan antar tahun untuk melihat kemajuan yang dicapai pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini secara konseptual belum ada kesepakatan mengenai nama dan jenis rasio keuangan apa saja yang dapat digunakan sebagai dasar menilai kinerja pemerintah daerah dengan acuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ardella, 2023). Indikator pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan menggunakan beberapa rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. (Nana et al., 2014).

Rasio kemandirian yang merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari daerah tinggi maka presentasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayain pelayanan pertumbuhan juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006). Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*. Rasio efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses suatu unit organisasi (Ardilla & Putri, 2015). Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan maka akan ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun (Kumpangpune et al, 2021).

## 2. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di website Portal DPJK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) dan juga dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2018 – 2023 dengan jumlah sebanyak 27. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *sampling* jenuh, teknik pengambilan sampel dengan cara menggunakan seluruh jumlah populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Sehingga banyaknya sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 162 sampel yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat periode 2018 – 2023.

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian. Analisa regresi berganda merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 atau lebih variabel *independent* dan *intervening* menggunakan analisis jalur (*path analysis*). persamaan disusun sebagai berikut:

**Persamaan I**

$$Z = \beta_1RK + \beta_2REPAD + \beta_3RE + e$$

**Persamaan II**

$$Y = \beta_1RK + \beta_2REPAD + \beta_3RE + \beta_4PE + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kemiskinan
- Z = Pertumbuhan Ekonomi
- $x_1$  = Rasio Kemandirian
- $x_2$  = Rasio Efektivitas
- $x_3$  = Rasio Efisiensi

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi

e = error

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

#### Analisis Deskriptif

Penelitian bertujuan untuk menganalisa pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Adapun hasil analisa dapat dijabarkan pada tabel 1 berikut.

Table 1. Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
RK	162	4	134	45	35
REPAD	162	12	317	97	14
RE	162	82	113	100	1
PE	162	-3,80	9,76	3,97	0,52
TK	162	2,07	13,13	8,26	2,74

Sumber: Data yang diolah (2024)

Rasio Kemandirian berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diketahui bahwa variabel rasio kemandirian memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 134. Besarnya nilai rata-rata (*mean*) yang didapatkan sebesar 45. Sedangkan nilai standar deviasi rasio kemandirian sebesar 35. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak *ekstren* semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Nilai minimum 4 berarti rasio kemandirian rendah tau tingkat kemandiriannya rendah, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pusat atau eksternal sangat tinggi. Nilai tersebut adalah Kabupaten Garut pada tahun 2019. Kemudian untuk secara keseluruhan rasio kemandirian Kabupaten/Kota se-Jawa Barat periode 2018 – 2023 dengan mean sebesar 45 berada dalam tingkat kemandirian baik atau sudah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pusat rendah.

Rasio efektivitas pendapatan berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diketahui bahwa variabel rasio efektivitas memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 317. Besarnya nilai rata-rata (*mean*) yang didapatkan sebesar 97. Sedangkan nilai standar deviasi rasio efektivitas sebesar 14. Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan). Dari hasil diatas rasio efektivitas minimum sebesar 12 masuk kategori tidak efektif sedangkan nilai maksimum 317 masuk kategori sangat efektif. Nilai minimum dengan kategori kurang efektif adalah Kota Sukabumi pada tahun 2023. Sedangkan nilai maksimum dengan kategori sangat efektif adalah Kota Bogor pada tahun 2022.

Rasio efisiensi pendapatan berdasarkan hasil uji statistic deskriptif diketahui bahwa variabel rasio efisiensi memiliki nilai minimum sebesar 82 dan nilai maksimum 113. Besarnya nilai rata-rata (*mean*) yang didapatkan sebesar 100. Sedangkan nilai standar deviasi rasio efisiensi sebesar 1. Semakin kevil rasio efisiensi maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungitan PAD. Dari hasil diatas rasio efisiensi

minimum sebesar 82 masuk kategori cukup efisien sedangkan nilai maksimum 113 masuk kategori tidak efisien. Nilai minimum dengan kategori cukup efisien adalah Kota Banjar pada tahun 2019. Sedangkan nilai maksimum dengan kategori tidak efisien adalah Kota Tasikmalaya pada tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan uji statistic deskriptif diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar -3,80 dan nilai maksimum sebesar 9,76. Besarnya nilai rata-rata (*mean*) yang didapatkan sebesar 3,97 dan besarnya nilai devias sebesar 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adanya pandemi covid-19 selama 2 tahun terakhir, namun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa Barat masih menunjukkan hasil yang positif.

Tingkat kemiskinan berdasarkan hasil uji statitsik deskriptif diketahui bahwa variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai minimum sebesar 2,07 dan nilai maksimum sebesar 13,13. Besarnya nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8,26 dan besarnya nilai standar deviasi sebesar 2,74. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan pada seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat memiliki tingkat variasi data yang tinggi.

### Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hasil dari uji regresi linier berganda ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Variabel	Persamaan 1				Persamaan 2			
	B	SE	t <sub>hitung</sub>	Sig.	B	SE	t <sub>hitung</sub>	Sig.
(Standardize d Coefficient)		5.5118	-1.552	.123		3.858	1.842	.067
RKKD	.002	.006	.266	.790	-.055	.005	-12.032	.000
REPAD	.007	.008	.838	.403	.006	.006	1.002	.312
REKD	.112	.051	2.204	.029	.034	.039	.878	.381
PE					-.082	.060	-1.378	.170
F <sub>hitung</sub>	4.098		Sig.F	.004	38.077		Sig.F	.000
R <sup>2</sup>	.126				.492			
Adjusted R <sup>2</sup>	.208				.479			

Sumber: Data olahan SPSS

Gambar 1. Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan gambar 1 maka persamaan persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Z = \alpha + \beta_1 RKKD + \beta_2 REPAD + \beta_3 REKD + e$$

$$Z = 2.418 + 0.002RKKD + 0.007REPAD + 0.112REKD + e$$

Persamaan II

$$Y = \alpha + \beta_1 RKKD + \beta_2 REPAD + \beta_3 REKD + \beta_4 PE + e$$

$$Y = 7.105 + -0.055RKKD + 0.006REPAD + 0.034REKD + -0.084PE + e$$

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Persamaan I

1. Berdasarkan hasil uji regresi, diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi mempunyai nilai konstanta 2.418 dengan nilai yang

positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 - 2023.

2. Koefisien regresi pada Rasio Kemandirian sebesar 0,002 dengan nilai yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel Rasio Kemandirian meningkat 1 maka pertumbuhan ekonomi meningkat 0.002. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Rasio Kemandirian maka nilai pertumbuhan ekonomi juga akan turun sebesar 0,002.
3. Koefisien regresi pada Rasio Efektivitas sebesar 0,007 dengan nilai yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila variabel Rasio Efektivitas meningkat 1 maka pertumbuhan ekonomi meningkat 0.007. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Rasio Efektivitas maka nilai pertumbuhan ekonomi juga akan turun sebesar 0,007.
4. Koefisien regresi pada Rasio Efisiensi sebesar 0.112 dengan nilai positif. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap penambahan 1 nilai variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah maka nilai pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,112. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Rasio Efisiensi maka nilai pertumbuhan ekonomi juga akan turun sebesar 0,112.

#### Persamaan II

1. Berdasarkan hasil uji regresi pada variabel 4.33, diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi (Z) mempunyai nilai konstanta sebesar 7.015 dengan nilai yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) diasumsikan sama dengan nol maka akan berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan.
2. Koefisien regresi pada Rasio Kemandirian sebesar -0.055 dengan nilai yang negatif. Hal ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1 nilai variabel Rasio Kemandirian maka nilai tingkat kemiskinan juga akan turun sebesar 0,055. Begitupun dengan sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Rasio Kemandirian maka nilai tingkat kemiskinan juga akan naik sebesar 0,055.
3. Koefisien regresi pada Rasio Efektivitas sebesar 0.006 dengan nilai yang positif. Hal ini mengandung setiap penambahan 1 nilai variabel Rasio Efektivitas maka nilai tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0,006. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Efektivitas Pendapatan Asli Daerah maka nilai tingkat kemiskinan juga akan turun sebesar 0,006.
4. Koefisien regresi pada Rasio Efisiensi sebesar 0.034 dengan nilai yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa jika setiap penambahan 1 nilai variabel Rasio Efisiensi maka nilai tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0.034. Begitupun sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Efisiensi Keuangan Daerah maka nilai tingkat kemiskinan juga akan turun sebesar 0,034.

5. Koefisien regresi pada Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebesar -0.082 dengan nilai yang negatif. Hal ini dapat diartikan jika penambahan 1 nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) maka nilai kemiskinan akan turun sebesar 0.082. Begitupun juga sebaliknya, setiap penurunan 1 nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) maka nilai tingkat kemiskinan juga akan menurun sebesar 0.082.

## Uji F

Hasil uji pada penelitian ini dapat dijelaskan dan dijabarkan pada gambar 2 berikut

Persamaan I			Persamaan II		
Df	$F_{hitung}$	Sig.	Df	$F_{hitung}$	Sig.
3	4.098	.004	4	38.077	.000

Sumber : Data olahan SPSS

Gambar 2. Hasil Uji F

### Persamaan I

Berdasarkan hasil uji F statistik pada tabel 4.16 diketahui bahwa besarnya nilai  $F_{hitung}$  pada persamaan I sebesar 4.098 dengan nilai signifikansi 0.004. Untuk nilai  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 dengan df pembilang = 3, dan df penyebut = 158, maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,66. Dengan demikian, hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya regresi berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### Persamaan II

Kemudian berdasarkan pada Uji F statistic pada tabel 4.16 diketahui bahwa besarnya nilai  $F_{hitung}$  pada persamaan II sebesar 38.077 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk nilai  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 dengan df pembilang = 4, dan df penyebut = 157, maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,43. Dengan demikian hasil perhitungan menunjukkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya regresi berarti dan dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan. Adapun hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut.

Variabel	Persamaan I		Persamaan II	
	$t_{hitung}$	Sig.	$t_{hitung}$	Sig.
(Constans)	-1.552	.123	1.842	.067
RKKD	.266	.790	-12.032	.000
REPAD	.838	.403	1.002	.318
REKD	2.204	.029	.878	.381
PE			-1.378	.170

Sumber : Data olahan SPSS

## Gambar 3. Hasil Uji T

## Persamaan I

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17, diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian memperoleh nilai signifikansi *p-value* sebesar  $0.790 > 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh variabel Rasio Kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17 diketahui bahwa variabel Rasio Efektivitas memperoleh nilai signifikansi *p-value*  $0,403 > 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh variabel Rasio Efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17 diketahui bahwa Rasio Efisiensi memperoleh nilai signifikansi *p-value* sebesar  $0.029 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya terdapat pengaruh variabel Rasio Efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023.

## Persamaan II

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17, diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian memperoleh nilai signifikansi *p-value* sebesar  $0.000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya bahwa terdapat pengaruh variabel Rasio Kemandirian terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17 diketahui bahwa variabel Rasio Efektivitas memperoleh nilai signifikansi *p-value*  $0,318 > 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya bahwa tidak terdapat pengaruh variabel Rasio Efektivitas terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17 diketahui bahwa Rasio Efisiensi memperoleh nilai signifikansi *p-value* sebesar  $0.381 > 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel Rasio Efisiensi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023.

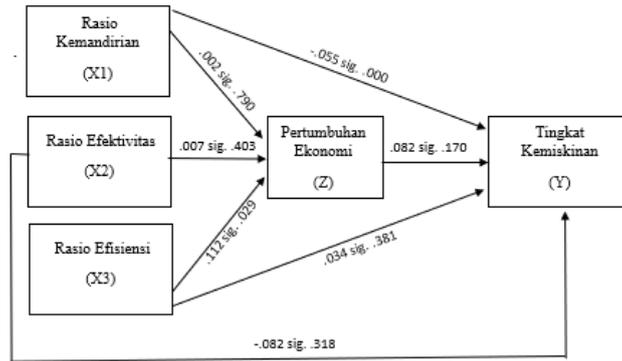
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.17 diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi (Z) memperoleh nilai signifikansi *p-value* sebesar  $0.170 > 0,05$ . Maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (Z) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023

**Uji Analisis Jalur (Path Analysis)**

Penggunaan signifikansi efek mediasi dilakukan dengan metode *sobel test*. Pada dasarnya *sobel test* adalah uji t khusus yang menggunakan efek dimasukkannya variabel intervening dalam model, apakah benar-benar berpengaruh signifikan secara statistic atau tidak. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai t hitung yang dibandingkan dengan t table, jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi

pengaruh mediasi (Ghozali, 2016). Nilai t tabel dengan signifikansi 5% atau 0,05 adalah sebesar 1,989. Berikut perhitungannya:

Berdasarkan analisis diketahui bahwa hasil uji *Path Analysis* dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. *Path Analysis*

Berdasarkan gambar 4 diatas, maka dapat dilakukan pengujian analisis jalur (*Path Analysis*) menggunakan uji sobel (*sobel test*). Uji sobel (*sobel test*) pada penelitian ini menggunakan kalkulator sobel test online dari website (<https://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm>). Adapun rangkuman dari uji sobel test dapat dijelaskan pada tabel 5.

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	p-value
RKKD	-.055	.005	0.1750
REPAD	.006	.006	0.4196
REKD	.034	.039	0.4623
PE	-.082	.060	

Sumber : Data olahan Kalkulator Sobel Test

Gambar 5. Hasil Kalkulator Uji Sobel

Hasil uji sobel pada tabel lihat terlihat bahwa *p-value* untuk hubungan variabel Rasio Kemandirian terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1750. Dari hasil tersebut membuktikan jika *p-value* sebesar  $0,1750 > 0,05$ , maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh variabel Rasio Kemandirian terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil uji sobel diatas terlihat bahwa *p-value* untuk hubungan variabel Rasio Efektivitas terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.4196. Dari hasil tersebut membuktikan jika *p-value* sebesar  $0,4196 > 0,05$ , maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh variabel Rasio Efektivitas terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil sobel diatas terlihat bahwa *p-value* Rasio Efisiensi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0.4623. Dari hasil tersebut membuktikan *p-value* sebesar  $0,4623 > 0,05$  maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh variabel Rasio Efisiensi terhadap tingkat kemiskinan.

Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini yaitu : Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh dari variabel Rasio Kemandirian , Rasio Efektivitas , dan Rasio Efisiensi terhadap tingkat kemiskinan. Hasil uji  $R^2$  dapat dilihat pada gambar 6.

	Persamaan I	Persamaan II
$R^2$	.126	.492

Sumber : Data olahan SPSS

Gambar 6. Hasil Uji  $R^2$

#### Persamaan I

Berdasarkan hasil pengolahan data pada gambar 6 menunjukkan nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada persamaan I sebesar 0.126. hal ini mengandung pengertian bahwa besarnya pengaruh langsung variabel Rasio Kemandirian , Rasio Efektivitas , dan Rasio Efisiensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 12,6%. Sedangkan sisanya sebesar 87,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

#### Persamaan II

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada tabel 4.19 diketahui bahwa besarnya nilai Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada persamaan II sebesar 0.492. hal ini memiliki arti bahwa besarnya pengaruh variabel Rasio Kemandirian , Rasio Efektivitas , dan Rasio Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi (Z) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 49,2%. Sedangkan sisanya yaitu 50,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu salah satunya kinerja keuangan daerah itu sendiri dimana terdapat Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi merupakan suatu rasio yang terdapat di dalam rasio-rasio kinerja keuangan itu diartikan bahwa tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi-potensi daerah akan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya pengembangan potensi-potensi daerah maka akan berdampak pada meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lebps dari tingkat kemiskinan. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Dimana kemiskinan itu sendiri adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan.

#### 4. CONCLUSION

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi se-Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian memiliki nilai rata-rata kemandirian sebesar 45% yang dapat diartikan bahwa kabupaten/kota se-Jawa Barat memiliki kategori baik dalam tingkat kemandiriannya daerahnya sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota se-Jawa Barat memiliki kemampuan pendanaan yang kuat dan memiliki kemampuan pendanaan yang solid tanpa ketergantungan yang besar pada transfer atau bantuan dari pemerintah pusat. Daerah yang mampu mengelola dan membiayai sebagian besar pengeluaran mereka dari pendapatan yang mereka hasilkan sendiri, dapat mencerminkan bahwa tingkat kemandirian finansial yang tinggi.
2. Rasio Efektivitas memiliki nilai rata-rata efektif sebesar 97% yang dapat diartikan bahwa kabupaten/kota se-Jawa Barat memiliki kategori efektif dalam tingkat efektivitas daerahnya sendiri. Rasio efektivitas merupakan indikator penting dalam mengevaluasi sejauh mana sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Jika rasio efektivitas yang efektif menunjukkan bahwa finansial digunakan dengan cara yang efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Daerah yang berhasil memanfaatkan bahwa alokasi dana yang susah menghasilkan *output* yang sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Rasio Efisiensi memiliki nilai rata-rata keefisienan sebesar 100% yang dapat diartikan bahwa kabupaten/kota se-Jawa Barat memiliki kategori tidak efisien dalam tingkat efisiensi daerahnya sendiri. Rasio efisiensi mengukur seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketika rasio efisiensi berada dalam kategori tidak efisien hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya tidak optimal dan hasil yang dicapai tidak sebanding dengan *input* yang dikeluarkan.
4. Rasio Kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023. Ketika rasio kemandirian suatu daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, ini menunjukkan bahwa meskipun daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian finansial tertentu, hal ini tidak secara langsung memengaruhi atau berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Rasio kemandirian menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pengeluaran mereka dari pendapatan daerah itu sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
5. Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023. Ketika Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan asli daerah dikelola dengan baik, hal tersebut tidak menghasilkan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal.

6. Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efisien berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan alokasi dana yang lebih efisien untuk proyek-proyek yang merangsang pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor. Pengelolaan keuangan yang efisien memungkinkan daerah berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan menciptakan peluang ekonomi yang baru.
7. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam indikator-indikator ekonomi seperti PDB atau investasi, hal tersebut tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa distribusi manfaat yang merata di seluruh lapisan masyarakat.
8. Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pada kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2018 -2023. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang tidak efisien sehingga alokasi anggaran tidak diarahkan pada program-program yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat miskin. Penggunaan anggaran yang lebih fokus pada proyek infrastruktur atau administrasi bukan pada program sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan, dapat mengurangi dampak positif dari efisiensi keuangan terhadap tingkat kemiskinan.

## 6. REFERENCES

- Ardella, V. (2023). Fast Fashion dan Implementasi Sdgs 12.6. 1 Di Indonesia: Kewajiban Laporan Keberlanjutan Perusahaan. *Moda: The Fashion Journal*, 5(2).
- Ardilla, I., & Putri, A. A. (2015). Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78-85.
- Astuti, M. &. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Dan Yogyakarta. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*.
- Ayuandina, F. G. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *dspace UII*.
- Azhari, M. Z. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2021). Indikator Makro Kemiskinan.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Tren Kemiskinan Jawa Barat.

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2023). Grafik Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2018-2023.
- Badan Pusat Statistika. (2023). Grafik Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2023.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of fiscal decentralization to economic growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 31(1), 1-13.
- Florida, A. (2006). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Kumpangpune, N., Saerang, D. P. E., & Engka, D. S. M. (2021). The Effect of Regional Financial Performance on Economic Growth and Its Impact on Poverty in Bitung City. *Journal of Regional Economic Development and Finance*, 20(3), 60-77.
- Kura, N. U., Ramli, M. F., Ibrahim, S., Sulaiman, W. N. A., Aris, A. Z., Tanko, A. I., & Zaudi, M. A. (2015). Assessment of groundwater vulnerability to anthropogenic pollution and seawater intrusion in a small tropical island using index-based methods. *Environmental Science and Pollution Research*, 22, 1512-1533.
- Nana, A. L., Kim, E. H., Thu, D. C., Oorschot, D. E., Tippett, L. J., Hogg, V. M., ... & Faull, R. L. (2014). Widespread heterogeneous neuronal loss across the cerebral cortex in Huntington's disease. *Journal of Huntington's disease*, 3(1), 45-64.